

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. A. Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum Demokrasi dan Pertanahan*. Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra AdityaBakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Cet. Ke. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetaka kedua, Sianar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Frenadin ade gustara, *Hukum Administrasi Negara*, buku ajar, universitas andalas, padang, 2005.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditam, Bandung, 2008.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas tanah di Indonesia*, Arkola, Jakarta, 2003.

John Salindheo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Maria S.W, Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan 1, Kompas, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosiasal Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2007.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.

N. E. Algra, et. Al, *Kamus Istilah Hukum – Fockemen Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983.

Nanik Trihasuti, *Hukum Kontrak Karya ( Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Phillipus M. hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

S. Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Dikantor Pertanahan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia ( Suatu Tujuan Secara Sosiaologis )*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kansisus, Yogyakarta, 2004.

Zaeni Asyahdie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.



## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketangalistrikan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Pengadaan Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemeberian dan Pembatalan Keputusan Pemeberian Hak Atas Tanah Negara.



Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut Perkabtan Nomor 8 Tahun 2012.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

### C. INTERNET DAN LAIN-LAINNYA

Kamus besar bahasa Indonesia, balai pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011.

Tesis Cristina Octavia, *Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

